**JAMINAN HAK BIOLOGIS PARANAPI DI LAPAS KELAS II A SAMARINDA**

**Dewi Maryah[[1]](#footnote-1)\***

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

**Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan sebuah pandangan dari sisi lain kehidupan para narapidana sebagai mahluk yang memiliki fitrah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri individu itu sendiri. Setiap manusia yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum akan menjalan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Konsep dari program Lembaga Pemasyarakatan yakni dengan memberika pengayoman, pembinaan dan memperlakukannya secara manusiawi berdasarkan HAM. Akan tetapi disisi lain dari HAM tersebut setiap napi tidak mendapatkan hak untuk kebutuhan biologis (seksualitas) dari suami-istri yang sah. Prorgram pembinanan kepribadian yang dimaksudkan adalah upaya mengalihkan hasrat seksualitas para napi. Pemenuhan hak biologis belum dapat diterapkan karena belum ada regulasi yang mengaturnya, keterbatasan sumber daya manusia di lapas, keterbatasan fasilitas gedung juga banyak menjadi penyebab tidak terpenuhinya jaminan hak biologis narapidana tersebut.

**Kata Kunci:** Hak Biologis; Jaminan; Narapidana.

1. **Pendahuluan**

Pelaku kejahatan bukanlah sifat yang mutlak karena tak bermoral, melainkan ada banyak faktor manusia bisa berprilaku menyimpang. Bukan hanya karena pergaulan yang terlalu bebas akan tapi, dorongan batin untuk berprilaku melawan hukum dapat disebabkan karena berbuat dalam keadaan terdesak dan terpaksa dengan demikian akal sehat manusia dapat mempengaruhi gejolak jiwa yang tak menentu dan mungkin pada akhirnya akan terpengaruh emosional dan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkannya menerima hukuman dan masuk dalam lembaga pemasyarakatan.

Setiap pelaku kejahatan dipaksa untuk menjalani hukumannya berdasarkan kesalahannya masing–masing sesuai fonis hakim dalam perkara putusaan. Mereka yang sedang menjalani hukum tersebut dikenal dengan sebutan “terpidana”.

Kehidupan para narapidana yang sifatnya terisolasi dari pergaulan masyarakat pada umumnya membuat mereka jauh dari keluarga. Akibat hukum yang dimunculkan karena tindakan melawan hukum menjadikannya semakin dikucilkan oleh masyarakat. Untuk itu para narapidana ditempatkan dalam lapas sebagi bentuk dari pembinaan menjadikannya sebagai manusia berprilaku baik.

Kehidupan para narapidana yang mendekap di dalam rumah tahan atau di penjara yang juga dikenal dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan dengan singkatan “LAPAS”, sangat berpengaruh dengan kondisi kejiwaan seseorang. Tujuan dari hukum penjara seperti itu adalah untuk memberikan pembinaan pada jiwa kemanusiaan, dan ruang yang ada pada lembaga pemasyarakatan tersebut diharpakan menjadi tempat untuk merenungi atas kesalahan–kesalahan dari perbatanya melawan hukum. Atas tindak pidana yang telah dilakuakan tersebut, sehingga membuatnya mendekap dipenjara dalam kurung waktu tertentu, sesuai dengan vonis hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim.

Keberadaan lembaga pemasyarakat merupakan ujung tombak dalam membina dan mengayomi para terpidan yang sedang menjalani hukuman namun tetap berada dalam koridor hak–hak asasi manusi. Dari bentuk pengayoman yang dimaksudkan itu, sehingga tujuan dari penjatuhan pidana bukanlah tindakan “balas dendam” sebagaimana aliran absolut yang dianut di Indonesia, akan tetapi dalam pembinaan dan pengayoman yang dilakukan berupa bekal hidup ketika terpidana[[2]](#footnote-2) habis masa hukuman sesuai vonis yang ditentukan maka meraka akan dikembalikan oleh negara untuk kembali ketengah–tengah keluarga dan masyarakat sebagaimana mestinya.

Masa tahanan yang diterima oleh terpidaka memiliki keberagaman masa/kurun waktu, sehingga jaminan haknya pun harus tetap terjamin selama mereka berda dalam masa tahanan atau masa menjalani hukuman tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hak asasi manusia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena penciptaan dan fitrah yang dimiliki oleh setiap insani adalah dengan tetap memanusiakan manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan.

Berbicara tentang hak asasi manusia (HAM) dalam keseharian para terpidana yang sedang menjalani masa hukuman dilapas tersebut menjadi sebuah momok yang menakutkan akan tetapi, negara berupaya menjadikan para tahanan atau narapidana orang yang bertobat menyadari kesalahannya dan negara dalam hal ini bertugas membina dan mengevaluasi kepribadiannya menjadi orang yang lebih baik lagi. Didalam pasal 3 Undang–Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwasanya system pembinaan pemasayarakatan dilaksanakan berdasarkan penerapan asas – asas sebagai berikut ini:

* 1. Mengayomi;
  2. Nondiskriminasi,
  3. Kemanusiaan,
  4. Gotong royong,
  5. Kemandirian,
  6. Proposionalitas,
  7. Kehilangan kemerdeakaan adalah satu–satunya penderitaan,
  8. Profesionalitas

Ada sedikit perbedaan yang merupakaan pembaharuan dari undang–undang terdahulu dan ini dirasa lebih komplit karena menanamkan nilai–nilai pancasila dan keagaman sebagimana mestinya. Akan tetapi dalam pelaksanaan yang terjadi di lapas bahwasanya masih ada hak terpidana yang belum di berikan secara untuh yakni Jaminan hak biologisnya beserta fasilitasnya. Kebutuhan biologis tidak hanya berupa kehidupan seperti makan, minum, hidup sehat dan bermasyarakat akan tetapi ada kebutuhan biologis yang sifatnya adalah fitrah manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna dan manusiawi yakni kebutuhan akan hubungan seksualitas bagi mereka yang sudah menikah sebagaimana mestinya.

Kebereadan beberapa Lapas yang ada di wilayah Kota Samarinda belum memberikan kesempatan atau Jaminan hak sebagaimana yang dimaksudkan pada penjelasan di atas. Jaminan kebutuhan hak biologis tersebut haruslah didukung dengan keberadaan fasilitas berupa ruang khusus untuk menyalurkan kebutuhan biologis dengan pasangan sah (suami-istri) tersebut yang dikenal dengan sebutan “*bilik asmara*”.

Rumusan Masalah: 1. Bagaimana implikasi hak biologis narapidana berdasarkan hukum positif? 2. Apa saja upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hak biologis narapidana pada lapas wilayah kota Samarinda? 3. Apa yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanan atas jaminan hak biologis narapidana di Lapas Wilayah Kota Samarinda?

Metode Penelitian: Penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta yang ada. Penelitian juga bisa diartikan sebagai suatu proses logis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan menggunakan informasi empiris. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.[[3]](#footnote-3)

Jenis penelitian yang digunakan untuk melanjutkan hasil riset ini adalah berjenis penelitian empiris (*field research*) yakni mengkaji permasalahan dengan berdasarkan fakta–fakta lapangan. Jenis penelitian empiris ini pada hakekatnya adalah merupakan kajian penelitian yang dilakukan dengan bertumpu pada data dan fakta yang ditemui di lapangan atau loksi penelitian. Penelitian empiris dengan kualitatif induktif yaitu data yang diberikan oleh informan dalam bentuk tertulis atau lisan, dan perilaku secara nyata[[4]](#footnote-4).

Sebelum mengajukan penelitian lebih lanjut, Penelitian telah melakukan survei terlebih dahulu. Pengamatan dilapangan yakni di Lembaga Pemasyarakata mengumpulkan bukti yang menjadi fakta lapangan dengan disertakan adanya teknik wawancara terstruktur bersama pihak–pihak terkait sesuai apa yang menjadi perumusan masalah yang ingin ditelaah.

Pendekatan Penelitian, adapun pendekatan penelitian dalam kajian riset ini yakni dengan melalui pendekatan kualitaif deskrikti, diman Penelitian kualitatif menurut ilmuan yang bernama Basrowi & Suwandi (2008: 2) menuturkan bahwa peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif didalamnya melibatkan peneliti sehingga akan paham mengenai konteks dengan situasi dan *setting* fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Dari setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lainnya karena berbeda konteksnya. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi.[[5]](#footnote-5) Pendekatan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif deskriktif yakni dengan memperhatikan subjek yang menjadi target penelitian yang kemudian dinarasikan dalam bentuk deskriktif (induktif).

Lokasi Penelitian, dalam hal ini peneliti mengambil lokasi dalam wikayah Kota Samarinda tepatnya ada pada Lapas Kelas 2 A Samarinda Jl. Letjen Sudirman. Akan tetapi untuk menambah kelengkapan dalam sebuah fenomena pemenuhan hal biologis para napi, maka peneliti juga mengamati beberapa lokasi rutan dan lapas di lurat dari lapas kelas 2 A Samarinda dengan tujuan sebagai pembanding semata, yakni lokasi Rutan (Rumah Tahanan) Kelas 2A Samairnda, Lapas Kelas 2 A Tenggarong, Lapas Narkotika Kaltim, dan Lapas Kota Balikpapan.

Fokus Penelitian, Fokus penelitian adalah menitikberatan suatu hal tertentu (issu social) yang menarik untuk dikaji dalam sebuah riset atau penelitian. Dalam hal ini yang menjadi focus penelitiannya adalah terletak pada kebutuhan biologis bagi para narapidana yang mana nara pidana dalam penelitian ini adalah subjek utama dan difokuskan pada permasalahan hak biologinya yang menjadi issu sosialnya. Dengan adanya fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi keluasan dalam pembahasan yang dapat mengalihkan topik permasalahan yang mungkin dapat lebih menjurus keberbagai arah pembahasan yanag tidak sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian yang dikaji secara kualitatif–empiris.

Sumber data, data yaitu suatu bahan keterangan tentang sumber objek penelitian. Sedangkan sumber data yaitu salah satu komponen yang paling penting dalam suatu penelitian, kesalahan dalam menggunakan data dapat membuat data yang didapatkan tidak sesuai dengan data yang diharapkan.[[6]](#footnote-6) Oleh karena itu, penulis harus dapat memahami sumber data yang diperoleh dari para informan. Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sebagai berikut:[[7]](#footnote-7) 1. Sumber data primer, data primer adalah data yang berasal dari sumber data umum yang berwujud, tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, hasil wawancara.[[8]](#footnote-8) Menurut Abdul Kadir Muhammad, data primer ialah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, bukan hasil olahan orang lain.[[9]](#footnote-9) Sumber data primer umumnya dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, survei, eksperimen, atau studi kasus. Dalam proses wawancara, peneliti berinteraksi dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan jawaban yang mendalam mengenai topik penelitian. Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku atau situasi yang ingin dipelajari. Survei mengumpulkan data melalui kuesioner yang diisi oleh responden. Eksperimen melibatkan pengujian hipotesis melalui manipulasi variabel tertentu. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam suatu kasus atau fenomena kompleks.

Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dari hasil pengamatan pada loksi penelitian di berbagai rutan dan lapas yang menjadi pembanding dalam pengamatan serta wawancara langsung dengan beberapa napi dan para tahanan. 2. Sumber data sekunder, Sumber data sekunder merujuk pada informasi atau data yang telah dikumpulkan, dipublikasikan, atau ada sebelumnya oleh pihak lain. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan, basis data, dan dokumentasi lainnya.

Sumber data sekunder memiliki peran yang signifikan dalam melengkapi dan mendukung penelitian. Pemanfaatan data yang telah ada sebelumnya membantu peneliti dalam memperoleh informasi yang relevan, menyediakan konteks yang mendalam, serta membantu dalam pengembangan pemahaman dan analisis yang lebih komprehensif. Dengan pemilihan dan evaluasi yang cermat, data sekunder dapat menjadi aset berharga dalam upaya untuk memahami dan menyajikan fakta yang lebih baik.

Selain dari buku-buku, jurnal dan artikel yang menjadi salah satu sumber data primer dibutuhkan adanya peraturan dan undang–undang yang relevan dengan adanya hak asasi manusia terhadap para napi dalam memenuhi hak biologisnya seperti adanya undang–undang tentang hak asasi manusia seperti: Undang–Undang Dasar 1945 pasal 28 B (1) bahwasanya setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkaan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agamanya; Undang– Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data ialah penghimpunan data yang diperlukan, relevan dan dapat memberikan gambaran penelitian, baik dalam penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Observasi. Observasi atau biasa disebut dengan pengamatan di gunakan untuk mengumpulkan data disertai dengan catatan-catatan terhadap keadaan atau perilaku objek penelitian.[[10]](#footnote-10) Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan mengamati aktifitas para napi dan para tahanan yang menjadi target dalam riset penelitian ini. Pengamatan yang dilakukan diantara dengan memperhatikan program kegiatan yang dicanangkan oleh instansi lembaga pemasyarakatan dibawah pengawasan kementrian hukum dan HAM Provinsi Kaltim. Mengamati kegiatan dalam aktivitas keseharian para narapidana yang ada menjadi rutinitas untuk mengalihkan hasrat dalam pemenuhan hak biologisnya.

Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab lisan kepada narasumber atau informan untuk mendapatkan keterangan atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin di teliti. Menurut Hopkins, wawancara merupakan cara untuk mengetahui tentang keadaan tertentu di suatu kelas melalui sudut pandang yang lain. Dalam teknik wawancara, peneliti terlibat dalam interaksi tatap muka langsung dengan subjek penelitian untuk mengumpulkan informasi atau data dengan menggunakan protokol wawancara yang telah ditetapkan. Panduan wawancara yang digunakan berbentuk "semi-terstruktur", di mana peneliti memulai wawancara dengan serangkaian pertanyaan terstruktur dan kemudian melanjutkan untuk menggali lebih dalam ke setiap subjek untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan lengkap.[[11]](#footnote-11)

Dalam kajian penelitian ini yang menjadi target dalam informan (wawancara) adalah pihak Narapidana, para tahanan, pihak petugas lembaga kemasyarakatan di berbgai temoat sebagai pembanding dari lembaga satu dengan lembag lainnya serta pihak kemenkumham provensi Kaltim yang jega telah memberikan surat rekomendasi untuk dapat melajutkan wawancara dan observasi di beberap lembaga kemasyarakatan yakni di Lapas Kelas 2 A Samarinda, lapas Narkotika, Lapas Tenggarong dan Balikpapan.

Dokumentasi. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Data dalam penelitian kualitatif sebagian besar diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara.[[12]](#footnote-12) Dalam penelitian ini dokumentasi yang dapat disuguhkan adalah hal–hal yang berkaitan dengan data dokumentasi berupa data–data yang diperoleh pada tempat lokasi penelitian serta dapat juga berupa dokumentasi berupa pengambilan gambar pada saat melakukan pengamatan lapangan.

Teknik Analisis Data, suatu penelitian ada beberapa macam langkah yang harus dilakukan Penulis dalam melakukan penelitian. Langkah-langkah tersebut salah satunya ialah langkah mengumpulkan data. Dari hasil pengumpulan data ini melalui analisis data maka peneliti akan mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukannya. Jadi, mengumpulkan data mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya dengan langkah-langkah yang lain dalam proses penelitian. [[13]](#footnote-13)

Berikut adalah jenis–jenis teknik pengumpulan data yang sering dilakukan oleh beberapa para ahli dalampenemuan sebuah risert yang sudah dibuat secara sistematis, yaitu: [[14]](#footnote-14) 1. Data Collection (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber mengenai data *Kasus Jaminan Hak Biologis Bagi Narapidana Di Lapas Kelas II A Samarinda*. 2. Data Reduction (Reduksi Data), ialah data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Laporan- laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal penting. 3. Data Conclousions Drawing/Verifying atau penarikan kesimpulan dan verifikasi, adalah penarikan kesimpulan yang awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila didukung oleh bukti yang valid maka kesimpulan tersebut merukan kesimpulan yang kredibel. Setelah mendapatkan jawaban dari subjek penelitian yang diwawancarai, maka akan dilakukan cross-check ulang dengan menyerahkan hasil wawancara kepada subjek penelitian yang telah diwawancarai, hal ini diperlukan untuk menjamin validitas data yang diperoleh.

1. **Pembahasan**

Penelitian empiris ini berjudul “Jaminan Hak Biologis Bagi Narapidana Di Lapas Kelas II A Samarinda***”*** telah menjadi fenomenal pada sisi lain dari sebuah tempat menjalankan hukuman, yakni Lembaga Pemasyarakatan yang lebih dikenal dengan sebutan “LAPAS” dengan golongan kelas II A Samarinda.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwanya LAPAS merupakan tempat berkumpulnya orang–orang yang sedang dalam masa hukuman akibat perbuatannya yang telah mekaukan perbuatan melawan hukum. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kota Samarinda bahkan seluruh kota yang ada di Indoneisa memiliki konsep yang sama yaitu menjadi tempat untuk merenungi perbuatan dan kesalahan yang pernah dilakukan sehingga mereka dibina untuk mendidik kepribadian dan pengembangan diri agar kelak mereka menjadi manusia yang bermoral, berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur.

Konsep kebaradaaan Lapas yang ada di Indoneisa lebih kepada konsep “pembinaan” bukan lagi dengan konsep “penjeraan”, sehingga masuk dan menjalani hukum di lapas bukan lagi hal yang menakutkan karena lembaga pemasyarakatan (penjara) saat ini tidak lagi menjaii tempat untuk memberikan efek jerah apalagi menjadi tempat untuk melampiaskan balas dendam dari para korban kejahatan, akan tetapi menjadi tempat menjalani hukuman dengan konsep “pembinaan” sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sekalipun mereka adalah orang–orang yang berkepribadian buruk atau jahat. Para napi menjalani masa hukum yang berfariasi tingkatannya, ada yang menjalani vonis hukuman 3 tahun ada 5 tahun hingga belasan tahun bahkan ada pula sampe vonis hukuman mati tapi di Indonesia masi sangat langka dengan vonis hukuman mati tersebut.

Secara kontekstual dengan keberadaan peraturan yang ada, maka hak–hak para narapidana masih terjamin karena masih mendapatkann fasilitas yang cukup layak sepeerti penyedeiaan makan dan minum yang teratur, tambahan adanya fasilitas *Video Call* dalm bilik tertentu untuk bisa berkomunikasi dengan sanak keluarga yang mungkin tidak dapat berkunjung secara langsung. Selai itu jam besuk/waktu berkunjung yang diberikan di dalam lapas diperbolehkan mendapatkan kiriman makanan atau minuman dengan dilakukannya pemeriksaan lebih dulu sebelum diserahkan pada napai yang bersangkutan. Tidak hanya sampai disitu, mereka juga diberikan sarana hiburan seperti olahraga dan seni musik serta fasilitas pelayanan kesehatan terkhusus mereka yang menderita penyakit dalam (riwayat kesehatan). Dari sekian hak yang diperoleh, hanya hak biologis sajalah (pemenuhan hak hubungan suami-istri) yang tidak dipenuhi selama para narapidana menjalankan mas hukumannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang ditemui beberapa narapidana, pada umumnya merasa butuh dengan hak biologis tersebut sebagai pengalihan rasa stress dan tekanan batin dari keadaan yang dirasakan selama mendekap di penjaran. Selain itu secara hukum Islam (bagi pemeluknya) ada syariat yang mengatur akan adanya pemenuhan nafkah zahir dan batin selama masih menjadi suami-istri yang sah. Jika terpisah dengan pasangan tentu ini tidak terealisasikan sebagaimana mestinya.

Dengan keadaan over kapasitas gedung atau blok hunian lapas menyebabkan para napi tidur dalam keadaan berdesak– desakan dan tidak menutup kemungkinan pun terjadi pelecehan seksual dan juga penyimpangan seksualitas seperti homosex dan lesbian.

Sementara dari hasil wawancara pihak petugas memiliki jawaban yang cukup fantastic, disisi lain ada yang mendukung dan dilain sisi adapula yang tidak mendukung dikarenakan keterbatasan SDM serta fasilitan yang dapat dijadikan tempat (bilik asmara) untuk melakukan hubungan suami istri pada pasangan yang sah menurut agama dan hukum.

1. **Implikasi pemenuhan hak biologis narapidana berdasarkan Hak Asasi Manusia**

Sebelum membahas lebih dalam mengenai pembahasan yang ada pada rumusan masalah, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang menjadi definisi dari arti sebuah kata “*implikasi”*. Berikut ini adalah beberapa definisi yang disampekan oleh pendapat ilmuan, diantanya adalah: [[15]](#footnote-15)

* + - * 1. Menurut Islamy (2003, 114-115), implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.
        2. Menurut Silalahi (2005),implikasi adalah akibat yang dihasilkan oleh adanya penerapan suatu kebijakan atau program yang sifatnya bisa baik maupun tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan tersebut.
        3. Menurut Winarno (2002:171-174): Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

1. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat;
2. Kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan;
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang;
4. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik;
5. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Dengan adanya kebijakan baru terhadap penerapan konsep pemidanaan yang ada dalam system lembaga pemasyarakatan yang berlaku diseluruh Indonesia yakni adanya konsep “*teori relatife*”[[16]](#footnote-16) dalam sebuah penjatuhan hukuman pidana kepada para terpidana.

Dalam teori pemidanaan dikenal dengan bentuk teori yaitu teori *absolute, teori relative dan teori gabungan (absolut-relatif).* Sebagimanayang kita ketahui bahwasanya teori absolut berfokus pada penjatuhan hukumagar pelaku tindak kejahatan merenungi perbuatan saslahnya dan bertujuan dari hukuman penjara yang dijalaninya mampu menumbuhkembangkan kepribadian yang lebih baik dalam artian konsep absolut ini tidak sepenuhnya menjadikan terpidana menjalani hukuman sebagai efek jera tapi lebih kepada membinanya untuk kembali pada kepribadian manuisa yang berbudi sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan paparan jenis teori tersebut (teori relative) yang menjadi penerapan yang ada dalam system lembaga pemasarakatan di Indoesia, yang menjadi sumber dari kebijakan peraturan yang sudah ditetapkan menjadikannya implikasi terhada pemenuhan hak biologis pada para terpidana.

Dari hasil lapangan yang ditemui oleh peneliti terdapat kesamaan jawaban dari petugas dan penanggung jawab baik itu dilapas Kelas II-A Kota Samarinda, lapas narkotika Kaltim, lapas Kelas II-A Tenggarong dan juga lapas Kota Balikpapan serta Rumah Tahanan Negara (Rutan) Samarinda yang memberikan keterangan jelas bahwasanya pemenuhan hak biologis bagi para narapidana baik itu napi berjenis kelamin wanita maupun pria adalah hal yang belum bisa dan tidak boleh terkabulkan secara gambling.

Dalam konsep Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan “lapas” saat ini sudah berbeda jauh dengan konsep terdahulu yang mana dulu menggunakan konsep “penjera-an” dengan memberikan kesan bahwa lapas atau rutan adalah sebuah momok yang menakutkan, sehingga orang yang pernah mendekap pada tempat terebut selalu merasa dihantui oleh rasa takut, yang menjadi sasaran pukulan dan perlakukan yang tidak menyenangkan baik dari napai yang lebih senior mapun perlakukan dari para petugas lapas dan rutan yang ada. Akan tetapi seiring perkembangan zaman dan dinamika pergerakan hukum dan politik maka konsep “penjera-an” berubah menjadi konsep “pembinaan”.

Menurut pendapat Adi Sujatno yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan bahwa dengan beralihnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dimana para narapidana diperlakukan lebih manusiawi dan juga dilakukan pembinaan berdasarkan pancasila agar mereka menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri, dan yang terpenting tidak mengulangi tindak pidana kejahatan lagi, sehingga diharapkan masyarakat sekitarnya dapat menerimanya kembali.[[17]](#footnote-17) Dengan demikian maka penerapan program di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh Nusantara adalah dengan menerapkan konsep “pembinaan” semata bukan lagi pada konsep “penjeraan”, sebagaimana yang termaktup di dalam pasal 3 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa :

” Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

pengayoman;

nondiskriminasi;

kemanusiaan;

gotong royong;

kemandirian;

proporsionalitas;

kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan

profesionalitas.”

Pergeseran paradigma dari lembaga penjara menjadi lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari elemen sistem peradilan pidana, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harus sinkron dengan elemen subsistem lainnya sebagai satu kesatuan bingkai atau kerangka kerja dalam sistem peradilan pidana terpadu. Bingkai sistem peradilan pidana yang dimaksud seharusnya berdasarkan pola hubungan yang sistematis, konsisten, dan saling bergantung antar elemen subsistem penegak hukum lainnya, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan).

Dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebutuhan dasar manusia seringkali disebut sebagai kebutuhan yang perlu untuk segera dipenuhi. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang langsung mempengaruhi hidup dan matinya seseorang, dengan begitu maka perlu segera untuk memenuhi apa yang menjadikebutuhannya.

Ada 5 (lima) kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow yaitu: [[18]](#footnote-18)

* 1. Kebutuhan Fisiologis

Umumnya kebutuhan fisiologis bersifat neostatik (usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik) seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Kebutuhan fisiologis ini sangat kuat, dalam keadaan absolut (kelaparan dan kehausan) semua kebutuhan lain ditinggalkan dan orang mencurahkan semua kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini.

* 1. Kebutuhan Keamanan (*Safety*)

Sesudah kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncul kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, kebebasan dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan fisiologis dan keamanan pada dasarnya adalah kebutuhan mempertahankan kehidupan. Kebutuhan fisiologis adalah pertahanan hidup jangka pendek, sedang keamanan adalah pertahanan hidup jangka panjang.

* 1. Kebutuhan Dimiliki dan Cinta (*Belonging and love*)

Sesudah kebutuhan fisiologis dari keamanan relatif terpuaskan, kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial dan cinta menjadi tujuan yang dominan. Orang sangat peka dengan kesendirian, pengasingan, ditolak lingkungan, dan kehilangan sahabat atau kehilangan cinta. Kebutuhan dimiliki ini terus penting sepanjang hidup. Ada dua jenis cinta (dewasa) yakni atau D-Love dan *ccc* atau *B-love.*

* 1. Kebutuhan Harga Diri

Saat kebutuhan dimiliki dan mencintai telah relatif terpuaskan, kekuatan untuk memotivasi melemah, diganti dengan motivasi harga diri. Adapun jenis harga diri yaitu yang pertama menghargai diri sendiri (*self respect*) dan yang kedua mendapat penghargaan dari orang lain (*respect from another*).

* 1. Kebutuhan aktualisasi diri

Lahirnya kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri adalah sesudah keseluruhan kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan meta menjadi sesuatu yang orang–orang wujudkan semaksimal mungkin dengan menuangkan seluruh bakat, kemampuan dan potensinya. Dengan demikian yang dimaksud aktualisasi yitu keinginna untuk mendapatkan kepuasan dengan dirinya sendiri (*self if fullfilment*), untuk memyadari semua potensi dirinya untuk menjadi apa saja yang dapat ia lakukan, dan mungkin dapat menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Manusia yang dikatakan dapat mencapai target aktualisasi dirinya adalah manusia yang mendapatkan kepuasan dari berbagai kebutuhan orang–orang disekitarnya dan orang–orang itu tidak menyadari bahwa ada sesuatu hal yang menjadi kebutuhan orang lain.

Dalam memenuhi hasrat seksualitas itu ditunjukkan pada poin c, bagian dari kebutuhan dimiliki dan cinta. Tuhan semesta alam menciptakan manusia dengan kelengkapan jasmani dan rohani begitu pula dengan kelengkapan alat reproduksi (bagian dari seksualitas manusia) dengan tujuan untuk berkembang biak selain dari kepuasan batin yang dirasakan untuk pasangan yang tentunya adalah pasangan dengan jenis kelamin yang berbeda.

Kebutuhan Dimiliki dan Cinta (*Belonging and love*) sebagaimana yang tercantum dalam poin c diatas menunjukkan akan pentingnya kebutuhan seksualitas brsama pasangan hidup tentunya pasangan yang sudah terikat dengan tali pernikahan yang sah menurut agama dan hukum. Kebutuhan seksualitas inilah yang menjadi maksud dari pemenuhan biologis dalam kajian penelitian ini.

Jika dilihat dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjadi dasar hak seorang narapidana selama berada dalam lembaga pemasyarakatan adalah apa yang di cantumkan oleh pasal 9, meyatakan bahwa:

“Narapidana berhak:

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.”

Dari isi pasal yang disebutkan di atas, hak–hak narapidana secara umum terpenuhi secara bijak dirumuskan dan diterapkan sedemikian rupa, lalu bagaimana dengan kondisi kebutuhan seksualitas yang menjadi bagian dari kebutuhan biologis manusia normal pada umumnya*.*

Kebutuhan biologis yang dimaksudkan dalam pembahasan penelitian ini adalah bagian dari kebutuhan seksualitas dalam hubungan intim seorang suami-istri yang berada pada ikatan batin secara sah menurut hukum dan agama yang dianut. Dimana para terpidana baik itu pria maupun wanita ketika menjalani hukuman bertahun–tahun lamanya, sementara mereka memiliki pasangan yang sah dan tidak dapat menafkahi secara batin dan tak jarang membuat mereka stres akibat tidak tersalurkannya hasrat sebagai manusia normal, dan dari aspek hukum Islam tentunya ini menjadi polemik dalam menjalankan peran dan fungsi (suami–istri) terkhusus dalam nafkah batin.

Sebagian besar para petugas Lapas beranggapan tidak perlu memenuhi hak biologis napi berupa kebutuhan seksualitas, dengan alasan pembinaan di lapas sudah cukup nayaman untuk kehidupan mereka jika dibandingkan sistem penjara di era tahan 90an sebelum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang ketentuan hak dan kewajiban napi dalam Lembaga Pemasyarakat. Dengan kata lain jika tetap deberi kesempatan mengenai kebutuhan biologis seksualitasnya maka sudah tidak ada lagi pidana bagi mereka dan itu sama saja kehidupan mereka seperti orang yang mengikuti pendidikan atau asrama biasa, inilah yang menjadi implikasi dari sebuah kebijakan baru dengan keberadaan fakta di lapangan.

Dalam Lembaga Pemasyarakataan dikenal istilah pembinaan, artinya pihak petugas atau istansi melakukan upaya pemeliharaan mental agar narapidana menjadi manusia yang kembali kejalan yang benar dengan menjadikannya manusia yang berakhlak, bermoral dan berbudi pekerti yang baik. Dalam hal pembinaan ini dibuatlah dalam bentuk program yang disebut dengan *“pembinaan pengembangan kepribadian dan kemandirian”*. Dimana yang dimaksud dengan pembinaan pengembangan kepribadian adalah sebuah upaya pembelajaran tentang prilaku kehidupan, baik itu secara rohani maupun jasmani. Sementara pembinaan kemandirian merupakan upaya pembelajaran dalam sebuah praktek yang dapat mengembangkan skill yang dimiliki atau bahkan membantu menemukan skill secara otodidak. Pengembangan skill ini bertujuan agar kelak jika sudah selesai menjalani masa hukuman para napi dapat lebih mandiri dalam mencari pekerjaan dengan berbekal hasil pengalaman dan pengetahuannya selama dalam binaan lapas seperti, kemampuan membuat mebel, bengkel las, menjahit, memasak, mengajarkan sebuah keterampilan dan lain sebagainya.

Keberadaan lembaga pemasyarakat merupakan ujung tombak dalam menbina dan mengayomi para terpidana yang sedang menjalani hukuman namun tetap berada dalam koridor hak–hak asasi manusia. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam namun tetap dalam pembinaan dan pengayoman berupa bekal hidup ketika terpidana selesai menjalankan masa hukuman di lembaga pemasyarakatan akan kembali ketengah-tengah keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya.

Berbicara tentang hak asasi manusia (HAM) dalam keseharian para terpidana yang sedang menjalani masa hukuman dilembaga yang disebut dengan istilah Lapas kerap menjadi hal yang menakutkan akan tetapi Negara berupaya menjadikannya para tahanan atau narapidana orang yang bertobat menyadari kesalahannya dan negara dalam hal ini bertugas membina dan mengevaluasi kepribadiannya menjadi orang yang lebih baik lagi. Dalam pasal 3 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwasanya: “Sistem pembinaan pemasayarakatan dilaksanakan berdasarkan penerapan asas–asas sebagai berikut ini:

* 1. Mengayomi;
  2. Nondiskriminasi;
  3. Kemanusiaan;
  4. Gotong royong;
  5. Kemandirian;
  6. Proposionalitas;
  7. Kehilangan kemerdeakaan adalah satu–satunya penderitaan;
  8. Profesionalitas;”

Ada sedikit perbedaan yang merupakan pembaharuan dari undang–undang terdahulu dan ini dirasa lebih komplit karena menanamkan nilai–nilai pancasila dan keagamaan sebagimana mestinya. Akan tetapi dalam pelaksanaan yang terjadi di lapas bahwasanya masih ada hak terpidana yang belum di berikan secara utuh yakni Jaminan hak biologisnya beserta fasilitasnya. Kebutuhan biologis tidak hanya berupa kehidupan seperti makan, minum, hidup sehat dan bermasyarakat akan tetapi ada kebutuhan biologis yang sifatnya adalah fitrah manusia sebagai penciptaan Tuhan yang sempurna dan manusiawi (manusia norma) yakni kebutuhan akan hubungan seksualitas bagi mereka yang sudah resmi menikah sebagaimana mestinya yang menjadi kekhawatiran dari konsep Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kemasyarakatan adalah menjadikan lapas sebagai tempat pembinaan bukan lagi sebagai tempat penjeraan bagi para napi.

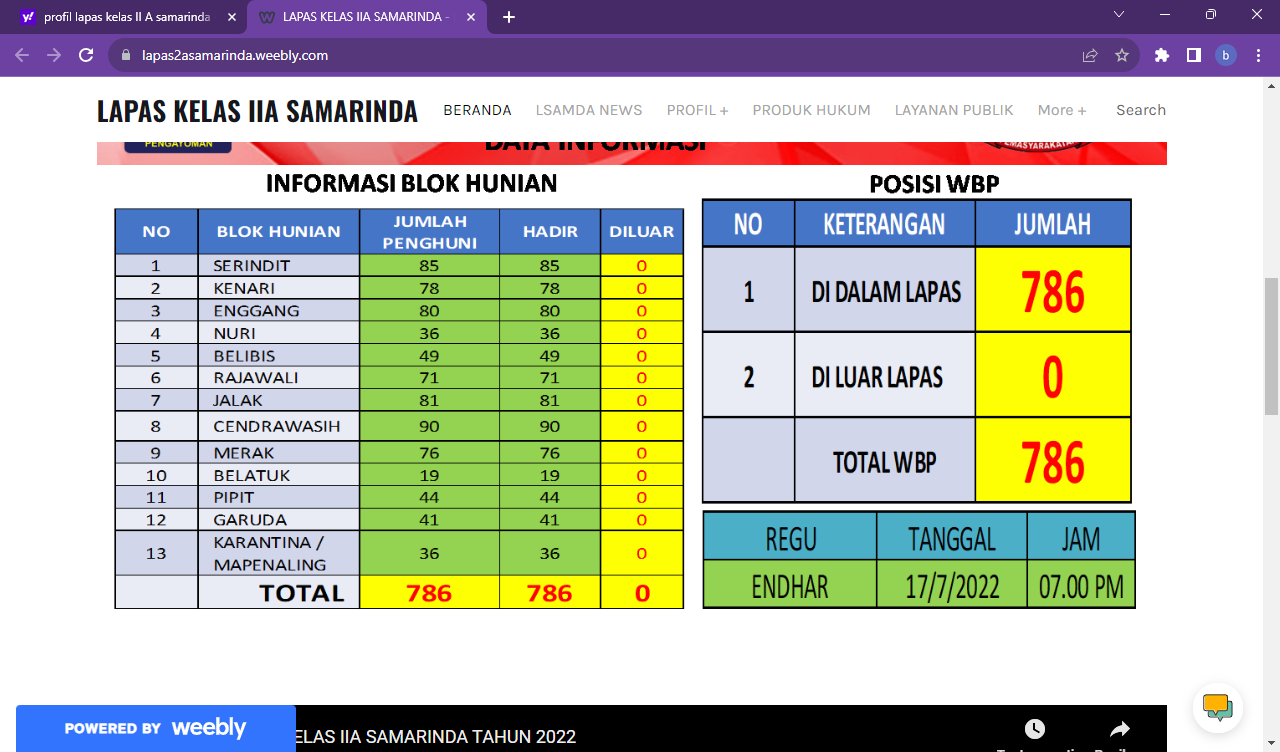
Dengan konsep tersebut maka tidak heran jika lapas dan rutan khususnya di Samarinda sudah terlalu over kapasitas, karena lapas bukan lagi momok yang menakutkan karena konsep penerapan fungsinya sudah berbeda konsep. Dengan begitu jumlah narapidana semakin bertambah sehingga blok hunian semakin berdesakan dan tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan seksualitas dan lain sebagainnya.

1. **Upaya Pemerintah dalam Memenuhi Kebutuhan Hak Biologis Narapidana di Lapas dan di Rutan Kelas II A Samarinda.**

Di bawah ini akan telah di buat dalam bentuk data tabel untuk Warga Binaan Penjara (WBP) yang menghuni blok Lapas Kelas II A Samarinda. Hanya saja data tersebut diperolah dari website situs milik Lapas Kelas II A Samarinda yang belum diperbarui, untuk sementara data dari bulan Juli tahun 2022.

**TABEL. I**

**Daftar Blok Hunian Warga Binaan Penjara Lapas Kelas II A Samarinda**

***Sumber: Dok. Lapas Kelas II A dalam*** [***https://lapas2asamarinda.weebly.com***](https://lapas2asamarinda.weebly.com/)

Program kerja Lapas Kelas II Samarinda sama dengan program kerja pada Lapas umum lainnya serta hal pengembangan kepribadian dan kemandirian dari diri narapidana yang sedang menjalani masa hukuman. Dari program kemandirian yang tak kalah pentingnya adalah memberikan program pemberantasan buta huruf aksara yang bekerja sama dengan PKBM Mahakam Jaya dengan program paket A, B, dan C.

Fasilitas yang ada, aula yang juga dapat digunakan untuk kegiatan kerohanian, ada fasilitas olah raga umum, fasilitas TV masing–masing blok, serta fasilitas telekomunikasi untuk memudahkan para napi berkomunikasi jarak jauh dengan keluarga namun kesemuaan fasilitias tersebut digunakan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku di dalam Lapas tersebut.

Secara fitrah sebagai insan yang normal baik wanita maupun pria yang berstatus menikah dengan pasangan hidup yang sah setidaknya memerlukan perhatian khusus, mengingat bahanya sebuah pelecehan seksual dan penyimpangan seksual antara sesama jenis yang tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat terjadi dengan keadaan kamar blok hunian sudah *over capacity*, sehingga tidur dengan keadaan berdempet satu sama lain hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan.

Oleh sebab itu dalam program Lembaga Pemasyarakatan memiliki dua hal penting dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan tercantum pada pasal 38 pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa: “Berdasarkan hasil Litmas, Pembinaan berupa:

* + - * 1. pembinaan kepribadian; dan
        2. pembinaan kemandirian.”

Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian ini menjadi program tetap yang dilakukan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Baik itu para narapidana maupun para tahanan Negara yang tercantum dalam pasal 24 dengan undang-undang yang sama.

Dari pasal 38 tadi kemudian di lanjutkan dengan kehadiran pasal 39 ayat 1 yang memberikan penegasan bahwasanya Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah. Demikian pula yang dilakukan oleh Lapas Kelas II Samarinda, dan beberapa lapas lainnya seperti Lapas Kelas II A Tenggarong, Lapas Narkotika, dan Rutan Kelas II A Samarinda. Beberapa kegitan yang masuk dalam program pembinaan Kepribadian adalah segala aktivitas atau kegiatan para napi khusunya di Lapas Kelas II A Samarinda, yang kecenderungannya pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat dengan demikiamn pembinaan yang ditujukan ke arah perbaikan-perbaikan rohani atau jiwa narapidana yang berperan penting dalam mempengaruhi pembentukan manusia-manusia yang sesat dengan agama, keyakinan, dan pandangan hidup dengan kata lain bahwa agama adalah ajaran Tuhan yang dapat membimbing seseorang untuk menuju jalan yang benar.[[19]](#footnote-19)

Beberapa kegiatan pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lapas Kelas II A Samarinda yang di sampaikan oleh bapak Hidayutllah, S.H,[[20]](#footnote-20) diantranya adalah solat berjamaah, pemberantasan buta Al-Quran, kegiatan rutin kerohanian, dan majelis tak’lim yang bekerja sama dengan kanwil kementrian Agama Kota Samarinda begitu juga dengan kegiatan rohani untuk agama yang non-muslim.

Sementara kegiatan yang berkenaan dengan program pembinaan kemandirian, diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Secara singakat disebutkan bahwa upaya pemerintah dalam memenuhi jaminan kebutuhan hal biologis narpaidana di Lapas Kelas II A Samarinda adalah dengan memberikan kesibukan–kesibukan dalam sebuah program pembinaan kepribadian dan pembinaan pada pengembangan diri. Dengan kesibukan tersebut diharapkan mereka dapat mengalihkan hasrat seksualitasnya dan mampu menjadinya berkepribadian yang lebih baik lagi.

1. **Kendala Penerapan Jaminan Hak Biologis Narapidana di Lapas Wilayah Kota Samarinda**

Lahirnya peraturan undang–undang yang mengatur tentang konteks pelaksanaan pemasyarakatan sama seperti “dua sisi mata uang”. Disi lain menjunjung hak asasi manusia agar para narapidana diperlakukan secara manusiawi dan dirangkul dengan cara diberikan pembinaan kepribadian dan pengembangan diri.

Hasil wawancara dari beberapa petugas yang ditemui di lapas dan juga di rumah tahanan Negara, telah disebutkan beberapa kendala untuk menerapkan jaminan hak biologis, diantaranya adalah:

1. Belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus tentang hak biologis yang dimaksudkan (kebutuhan seksualitas);
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di setiap Lapas dan rutan yang ada khusunya di kota Samarinda.
3. Keterbatasan fasilitas berupa ruang khusus untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang biasa di istilahkan dengan sebutan “Bilik Asmara”
4. Jumlah narapidana yang selalu bertambah sehingga mempersulit untuk mengatur pemenuhan hak tersebut. Dengan jumlah yang banya dirasa lebih sulit dalam mengatur penjadwlan utnuk sebuah kamar khusus (jika bilik asmara itu dibuat dalam lingkungan LApas atau rutan);
5. Jika hak jaminan biologis itu terpenuhi, maka hilanglah sanksi–sanksi pidana bagi diri mereka. Karena tidak ada lagi efek jera yang dapat membuatnya sadar untuk tidak berbuat melanggar hukum pidana.
6. **Kesimpulan**

Keberadaan hukum merupakan hal yang menjadi pembatasan ruang gerak bagi masyarakat umum untuk tidak saling mengganggu, mengusik, hingga menyakiti baik secara fisik maupun non fisik. Hukum di buat untuk mengatur, menertibkan agar dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, damai aman dan tentram yang merupakan efak dari makna sebuah keadilan. Bagi pelanggar hukum akan mendapatkan sanksi, baik itu sanksi moral, sanksi administrasi, denda hingga hukuman penjaran bahkan hukuman mati.

Semboyan dari sebuah penerapan hukum menyebutkan bahwasanya hukum haruslah diperkuat dengan sanksi. Sebab keberadaan sebuah sanksi atau ancaman akan menambah rasa waspada pada mereka yang berniat hendak melakukan perbuatn melawan hukum. Akan tetapi, dalam hukum sebuah sanksi tidak lantas meberikannya ancaman yang berat melainkan melalui tahapan–tahapan dari bentuk kesalahan sehingga sanksi sebelumnya berupa sanksi administrasi lalu sanksi denda hingga pidana kurungan dengan batas waktu kurungan yang bebeda pula namun sanksi pidana yang paling berat adalah berupa vonis hukuman mati. Sanksi pidana merupan satu–satunya jalan terahir hal ini denkan dengan istilah “*ultimum remedium*”.

Manfaat penerapan pembinaan pada mereka para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk mendidik dan menanamkan sikap dan prilaku yang lebih bermoral dengan begitu dapat segera menyadarkan atas apa yang membuatnya merasa bersalah dan mau berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini yang menyebabkan bahwasanya pentingnya mengayomi para terpidana dengan melalui program pembinaan di lembaga kemasyarakatan agar kedepannya usai menjalani hukuman mereka kembali diterima bergaul ditengah–tengah masyarakat.

Yang menjadi kekawatiran dari konsep Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kemasyarakatan adalah menjadikan lapas sebagai tempat pembinaan bukan lagi sebagai tempat penjeraan bagi para napi. Dengan konsep tersebut maka tidak heran jika lapas dan rutan khususnya di Samarinda sudah terlalu over kapasitas, karena lapas bukan lagi momok yang menakutkan karena konsep penerapan fungsinya sudah berbeda konsep. Dengan begitu jumlah narapidana semakin bertambah sehingga blok hunian semakin berdesakan dan tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan seksualitas dan lain sebagainya.

Secara singkat disebutkan bahwa upaya pemerintah dalam memenuhi jaminan kebutuhan hal biologis narpaidana di Lapas Kelas II A Samarinda adalah dengan memberikan kesibukan–kesibukan dalam sebuah program pembinaan kepribadian dan pembinaan pada pengembangan diri. Dengan kesibukan tersebut diharapkan mereka dapat mengalihkan hasrat seksualitasnya dan mampu menjadinya berkepribadian yang lebih baik lagi.

Telah disebutkan beberapa kendala untuk menerapkan jaminan hak biologis, diantaranya adalah:

1. Belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus tetang hak biologis yang dimaksudkan (kebutuhan seksualitas);
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di setiap Lapas dan rutan yang ada khusunya di kota samarinda.
3. Keterbatasan fasilitas berupa ruang khusus untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang biasa di istilahkan dengan sebutan “Bilik Asmara”
4. Jumlah narapidana yang selalu bertambah sehingga mempersulit untuk mengatur pemenuhan hak tersebut. Dengan jumlah yang banya dirasa lebih sulit dalam mengatur penjadwlan utnuk sebuah kamar khusus (jika bilik asmara itu dibuat dalam lingkungan Lapas atau rutan);
5. Jika hak jaminan biologis itu terpenuhi, maka hilanglah sanksi–sanksi pidana bagi diri mereka. Karena tidak ada lagi efek jera yang dapat membuatnya sadar untuk tidak berbuat melanggat hukum pidana.

**Daftar Pustaka**

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bhineka Cipta, 1997.

Ashri, Uhammad. *Hak Asasi Manusia Filosofi Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar: C.V. Social Politic Genius. 2018.

Berita (Liputan 6, Jakarta) 17 macam kebutuhan manusia, edisi Juli 2021. Link: <Https://Id.Berita.Yahoo.Com/17-Macam-Kebutuhan-Manusia-Ketahui->[055011257.html](https://id.berita.yahoo.com/17-macam-kebutuhan-manusia-ketahui-055011257.html)

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Peemesyarrakatan Republik Indonesia.

Faisal, Jurnal Media.com, 2019, link: http:// www.jurnalmediaindonesia.com/2019/07/napi-berubah-menjadi-[homoseksual-dan.html](http://www.jurnalmediaindonesia.com/2019/07/napi-berubah-menjadi-homoseksual-dan.html)

Fuad, Munir dan Laura Sylvia. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta, PT Charisma Putra Pratama, 2015.

Gustia, Deddet. Skripsi, “Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Makanan yang Layak Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Padang”, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2018.

Hakim, Lukman. “Implementasi Teori Dualisme Hukum Pidana di dalam Rancangan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (RKUHP)”, *Jurnal Kaha Bayangkara*, Vol. XIII, No. 1, 2019.

Handoyono, Sapto. “Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, *Pakuan Low Review*, Vol. IV. No. 1, 2018.

Ibrahi, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Indah, Nur. Skripsi,” Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Masapembinaandi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang. Fakultas Ilmu Social, Universitaas Negeri Semarang 2020.

Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. III, No. 2, 2021.

Kamus (KBBO Online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terisolasi> Kemnkumham, Kebutuhan Biologis Tak Tersalurkan, Napi Berubah Menjadi Gay dan Lesbi.

Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkuham Nomor Pas-14.Ot.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal17 Oktober 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM RI.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor Pas-499. Pk.02.03.01 Tahun 2015 Tentang Standar Evaluasi Hunian Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.

Malik, Abdul. Artikel hukum, Teori Pemidanaan dan Teori Penanggulangannya, Situs Hukum , 2020, link : [https://www.situshukum.com/2020/12/teori-](https://www.situshukum.com/2020/12/teori-pemidanaan-dan-teori-penanggulangannya.html) [pemidanaan-dan-teori-penanggulangannya.html,](https://www.situshukum.com/2020/12/teori-pemidanaan-dan-teori-penanggulangannya.html) akses tanggal 16 September 2022.

Mangkepriyanto, Extrix. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Jakarta: Guepedia, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Dilingkungan.

Michael, Donny. “Penerapan Hak–Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1.A Tanjung Gusta, Sumatra Utara ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Penelitian Hukum (De Jure)*, Vol.17, No. II.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Mulandari, Sri. “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan”, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. IX, No. 2, 2013.

Nickel, James W. *Making Sense of Human Rights*. rev. Edn. Washington, D.C, Georgetown University Press, 2004.

Pramadhani, Tiyas Ardian dan Mitro Subroto, “Kebutuhan Biologis Narapidana Seumur Hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciancur”, *Jurnal Jussticiabelen*, Vol. II, No. 1, 2022.

Rahman, Fahrur, Skripsi, “Pemenuhanhak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah atas Pekerja yang Layak, Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iiambon.” Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institute Agama Islam Negeerii Ambon, 2021.

Sandra, Vanessa,” Pengaruh Overcapacitylembaga Pemasyarakata Terhadap Kineerja Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Sleman, Yogyakarta” Jurnal Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitasatmajaya Yogyakata, 2016.

Sudarto. *Hukum Pidana Jilid 1 A*. Semarang: FH Undip, 1975.

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kemasyarakatan.

Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Utama, Arifa dan Dey Ravena. “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta dihubungkan dengan Hak-Hak Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”, *Porsiding Ilmu Hukum*, Vol. III, No. 1, 2017.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Sinar Grafika, 2004.

Yusra, Zhahara dkk. “Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan Pada Masa Pendemi Covid-19”, *Jurnal Pembelajaran Seumur Hidup*, edisi Vol. IV, no. 1, 2021.

\*lembar ini sengaja dikosongkan

1. \* [dewi.pribadi86@gmail.com](mailto:dewi.pribadi86@gmail.com) [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Malik, artikel hukum, *Teori Pemidanaan dan Teori penanggulangannya,* situs hukum ,2020, link: [https://www.situshukum.com/2020/12/teori-pemidanaan-dan-teori-](https://www.situshukum.com/2020/12/teori-pemidanaan-dan-teori-penanggulangannya.html) [penanggulangannya.html, a](https://www.situshukum.com/2020/12/teori-pemidanaan-dan-teori-penanggulangannya.html)kses tanggal 16 September 2022. [↑](#footnote-ref-2)
3. Yoga Winando, Artikel *“GuruPendidikan.com*”, 2023, link:

   <https://www.gurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/>,diakses bulan September 2023. [↑](#footnote-ref-3)
4. Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Hukum Pascasarjana UNS, 2018), h. 32. [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum,* Vol. XXI, no. 1, 2021, h.34 [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum,* Vol. XXI, No. 1, 2021, h. 34. [↑](#footnote-ref-6)
7. Elvera dan Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), h. 66-76. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2002) h. 15 [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Kadir Muhmmad, *Hukum dan...,* h. 170. [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zhahara Yusra, dkk., “Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan Pada Masa Pendemi Covid-19”, Jurnal *Pembelajaran Seumur Hidup,* edisi no. 1, Vol. IV, 2021. [↑](#footnote-ref-11)
12. Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, dalam Jurnal Wacana edisi no. 2 Vol. XIII, 2014. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), h. 103-104. [↑](#footnote-ref-13)
14. Aji Damanuri, “Metodologi Penelitian Mu’amalah”, dalam Skripsi Raudah Pengelolaan Limbah Masker Sekali Pakai Dalam Perspektif Al-Fiqh Al-Bi’ah (Samarinda: Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022). [↑](#footnote-ref-14)
15. Stefani Ditamei – detikJabar, dalam: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis-dan-contohnya>, akses tangaal 4 Agustus 2023. [↑](#footnote-ref-15)
16. P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika. 1984), h. 25. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lauditta Indahdewi dan Dinas Darmawan,” Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas”, *Journal of Correctional Issues,* Vol. IV. No. 2, 2021. h. 128.

    [↑](#footnote-ref-17)
18. Yurike Viorina, “Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules”, *Wajah Hukum*, Vol. V, No.1, 2021. h. 300–301. [↑](#footnote-ref-18)
19. Dimas Dhanang Sutawijaya, “Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cibinong”, *Jurnal Gema KeadilaIan,* Edisi: 2, Vol.VII, 2020, h. 88. [↑](#footnote-ref-19)
20. Hidayutllah, Kepala Urusan Umum, Lapas Kelas II A Samarinda, akses bulan Agustus 2023. [↑](#footnote-ref-20)